

## PERAN CAMAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA

Rika Misiyanti<sup>1</sup>

### *Abstrak*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Peran Camat Dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Peran Camat dalam pembangunan fisik merupakan segala aktivitas dan keikutsertaan camat secara aktif didalam menyusun rencana pembangunan fisik di Kecamatan meliputi penyerapan partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan pembangunan fisik, kegiatan perencanaan pembangunan fisik, koordinasi perencanaan pembangunan fisik dan pengawasan.*

*Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara secara mendalam dan dokumen.*

*Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyerapan partisipasi masyarakat Kecamatan Sungai Kunjang sudah terlaksana dengan baik, dimana masyarakat selalu dilibatkan dalam pembangunan fisik, Camat selalu melibatkan diri dalam kegiatan perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat Kecamatan sudah dilakukan dengan aktif dan baik, Camat berkoordinasi membahas pembangunan fisik sudah dilakukan dengan baik dan menjalin hubungan komunikasi yang harmonis melalui media musyawarah rencana pembangunan Kecamatan dan pengawasan yang dilakukan camat dalam bentuk inspeksi langsung, observasi dan laporan secara lisan dan tertulis.*

**Kata kunci :** Peran Camat, Pembangunan Fisik

### **Pendahuluan**

Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Camat. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota, karena memiliki kedudukan tertinggi di kantor Kecamatan, Camat merupakan pemimpin dalam organisasi pemerintah Kecamatan.

---

<sup>1</sup>MahasiswaProgram S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Rikha\_fairy@yahoo.com

---

Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap kehidupan. Pembangunan yang baik akan terselenggara, apabila diawali dengan perencanaan yang baik sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik. Keterlibatan seorang pemimpin sangat diperlukan untuk menarik partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan. Perkembangan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari beberapa faktor, termasuk Visi, Misi, arah pembangunan daerah ( RPJP, RPJMD, RKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebutuhan masyarakat, kondisi geografis, sumber daya alam (SDA), sumber dayam manusia (SDM), serta tingkat investasi dari investor ke daerah tersebut.

Peran camat dalam pembangunan di Kecamatan mempunyai peran besar dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Dengan demikian camat lebih berkonsentrasi pada pelaksanaan tugas pemerintahan dan menjalankan tugas-tugas yang pokok sebagai camat. Dengan adanya peran Camat dibidang pembangunan di kecamatan tersebut tidak menyimpang dari peraturan, instruksi dan rencana Camat selaku pimpinan yang baik.

Perencanaan pembangunan pada tingkat Kecamatan tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 20 sebagai berikut: (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan. (2) Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kota Samarinda. (3) Perencanaan pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan secara partisipatif. (4) Mekanisme penyusunan rencana pembangunan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana peran camat dalam pembangunan fisik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda .

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan peran camat dalam pembangunan fisik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai proses pembelajaran bagi penulis dalam menganalisis masalah yang timbul secara ilmiah.
2. Diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan bagi pemerintah Kecamatan Sungai Kunjang dalam pelaksanaan pembangunan fisik.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Peran***

Peran mengandung hal dan kewajiban yang harus dijalani seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga di masyarakat.

Menurut Karl dan Rosenzweig (2002), konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dengan kegiatan dalam kedudukan tertentu baik dalam system masyarakat maupun dalam organisasi. Selanjutnya, mereka menyimpulkan peranan adalah perilaku yang langsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam struktur organisasi.

Menurut Komaruddin (1994), yang dimaksud peran adalah :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen.
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

### ***Pengertian Kepemimpinan***

Kepemimpinan sebagai ilmu adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam hal ini yang memimpin adalah pemerintah sedangkan yang dipimpin adalah rakyat sendiri, obyek materinya adalah manusia. Kepemimpinan sebagai seni adalah bagaimana seorang pemimpin pemerintahan dengan keahliannya mampu menyelenggarakan pemerintahan secara indah.

Menurut Kartini Kartono (2010), Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan tertentu.

Aspek-aspek kepemimpinan menurut Ernie Trisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah (2005) adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan

Merencanakan berarti melihat jauh ke depan dan menentukan terlebih dahulu yang akan dikerjakan, merancang bagaimana jalannya pekerjaan dan mempersilahkan hal-hal yang perlu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Pengarahan

Pengarah yaitu untuk membimbing bawahan dalam mencapai tujuan, menjaga keharmonisan dengan harapan dapat menciptakan keselarasan antar tenaga kerja.

### 3. Pengkoordinasian

Pengkoordinasian merupakan usaha untuk menyatupadukan dan menyeleraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan, sehingga tercipta suatu kerja sama yang terarah dan dapat mencapai tujuan bersama.

### 4. Pengawasan

Merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana semula serta mengatur dan memperbaiki bila terjadi penyimpangan, sehingga yang dikerjakan akan berjalan dengan baik.

## ***Camat***

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 13 Tahun 2008. Kecamatan merupakan wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Camat mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendorong peran serta masyarakat untuk ikut mensukseskan perencanaan pembangunan dilingkup kecamatan, sekaligus melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta.

2. Pengkoordinasian upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan serta penegakan peraturan perundang-undangan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan Kepolisian Negara.
3. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum baik dengan pihak swasta maupun dengan instansi terkait.
4. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal agar bersinergi.
5. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam upaya memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi serta pengawasan tertib administrasi pemerintahan kelurahan.
6. Pelaksanaan pelayanan masyarakat baik sesuai ruang lingkup tugasnya maupun tugas tugas yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kecamatan dalam upaya percepatan pencapaian standar pelayanan maksimal.
7. Pelaporan pelaksanaan tugas secara periodic dan tepat waktu kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah .

### ***Pengertian Pembangunan***

Menurut Rustiadi Ernani dkk (2011), pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Pembangunan lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, secara lebih sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik.

Menurut Sumodiningrat (1998), mengatakan bahwa syarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

### ***Pembangunan Fisik***

Menurut Wresniwiro (2007), Pembangunan terdiri dari pembangunan fisik berupa infrastruktur bangunan fasilitas umum dan non fisik berupa peningkatan perekonomian rakyat. Fisik merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan diraba seperti badan, bangunan, jalan, jembatan dan lain-lain.

Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, pengawasan, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek

itu sendiri, agar dalam pelaksanaan kegiatan akan berdaya guna dan berhasil bagi masyarakat. Pembangunan fisik berarti prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha, pembangunan dan lain-lain.

### ***Definisi Konsepsional***

Penulis merumuskan definisi konsepsional dari penelitian ini yaitu peran Camat dalam pembangunan fisik merupakan segala aktivitas dan keikutsertaan camat secara aktif didalam menyusun dan melaksanakan pembangunan fisik di Kecamatan, seperti penyerapan partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan pembangunan, kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan, koordinasi perencanaan pembangunan dan pengawasan perencanaan pembangunan.

### ***Metode Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif.

### ***Fokus Penelitian***

Fokus penelitian merupakan batasan dalam penelitian untuk memenuhi kriteria suatu informasi di lapangan sehingga dapat mengetahui data yang perlu diambil. Adapun yang menjadi fokus penelitian Peran Camat Dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda meliputi :

1. Penyerapan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Fisik
2. Kegiatan Penyusunan Perencana Pembangunan Fisik
3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan
  - (a.i.1.a) Koordinasi Vertikal
  - (a.i.1.b) Koordinasi Horizontal
4. Kegiatan Pengawasan Perencanaan pembangunan
  - (a.i.1.a) Pengawasan Langsung
  - (a.i.1.b) Pengawasan Tidak Langsung

### ***Sumber Data***

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber Data Primer
2. Sumber Data Sekunder
  - a.i.1.b.i.1.a. Dokumen, laporan dan evaluasi
  - a.i.1.b.i.1.b. Buku-buku ilmiah

Dalam penelitian ini penulis menentukan narasumber dilakukan melalui *Teknik purposive sampling*.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)
2. Penelitian lapangan (*Field Research*)
  - a.i.1.b.i.1.a. Pengamatan (*Observasi*)
  - a.i.1.b.i.1.b. Wawancara (*Interview*)
  - a.i.1.b.i.1.c. Mengumpulkan data (*Dokumentasi*)

### ***Hasil dan Pembahasan***

Hasil penelitian mengenai Peran Camat dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Secara umum semua kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan umumnya bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik maupun infrastruktur kelembagaan. Camat memiliki peran penting dalam proses pembangunan yakni turut berperan dalam proses perencanaan, koordinasi, pengawasan dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pelaksanaan program pemerintah.

### ***Penyerapan Partisipasi Masyarakat pada Kegiatan Perencanaan Pembangunan Fisik***

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis menyimpulkan bahwa Peran Camat dalam menyerap partisipasi masyarakat Kecamatan Sungai Kunjang sudah terlaksana dengan baik, dimana Camat memberika hak seluas-luasnya kepada masyarakat dan melihat minat masyarakat untuk selalu dilibatkan dalam pembangunan fisik mulai dari pengusulan di pramusrembang Kelurahan sampai dengan musrembang tingkat Kecamatan, adanya swadaya masyarakat dalam gotong-royong serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pada setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan maupun di Kelurahan.

Apabila dikaitkan dengan teori bahwa partisipasi sebagai salah satu elemen pembangunan proses adaptasi masyarakat masyarakat terhadap perubahan yang sedang berjalan dengan demikian partisipasi mempunyai posisi yang penting dalam pembangunan. Sumodingrat (1988), mengatakan bahwa syarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Selain itu Conyers (1991), memberikan tiga alasan utama sangat pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu ; (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan dan proyek akan gagal, (2) masyarakat mempercayai program pembangunan jika

dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena masyarakat lebih mengetahui seluk beluk proyek dan merasa memiliki proyek tersebut, (3) partisipasi merupakan hak demokrasi masyarakat dalam keterlibatannya dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan akan sangat banyak membantu pemerintah dalam kendala yang mungkin terjadi dapat dipecahkan dan diselesaikan secara bersama-sama sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat

### ***Kegiatan Penyusunan Perencanaan Pembangunan Fisik***

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran camat dalam kegiatan perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat Kecamatan sudah dilakukan dengan baik, dimana camat terlibat dalam menyetujui hasil perencanaan yang akan diperjuangkan pada musrenbang tingkat Kota. Baik ditingkat kelurahan sampai pada tingkat Kecamatan selalu melibatkan Camat sebagai Muspika Kecamatan, LPM Kelurahan, Lurah, Ormas, FKPM, FORKOHAT, yang terkait dengan tokoh-tokoh masyarakat dan PKK tingkat kelurahan dan kecamatan dan anggota dewan daerah pilih Sungai Kunjang. Perencanaan pembangunan yang melibatkan unsur masyarakat baik secara individu maupun perwakilan pada setiap proses kegiatannya dan memberikan hak kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan suatu bentuk peran serta masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan di mana masyarakat dapat mempengaruhi arah serta menentukan keputusan terhadap kegiatan pembangunan. Merencanakan yang berarti melihat jauh ke depan dan menentukan terlebih dahulu yang akan dikerjakan, merancang bagaimana jalannya pekerjaan dan mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai aspirasi masyarakat.

### ***Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan***

#### ***a. Koordinasi Vertikal***

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa dalam berkoordinasi vertikal Camat sudah melakukan koordinasi fungsional seperti Lurah, Dinas PU dan Bina marga dan pengairan. Selain itu koordinasi teknis fungsional seperti LSM, Parpol, Ormas. Camat dalam berkoordinasi membahas pembangunan fisik yaitu melalui media musyawarah rencana pembangunan Kecamatan (Musrenbang). Camat dalam koordinasi vertikal dapat dilihat bahwa kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh Camat dilakukan terhadap tingkat organisasi yang setingkat yaitu adanya koordinasi vertikal ke atas dan koordinasi vertikal ke bawah. Camat sudah melakukan koordinasi vertikal dengan baik, berdasarkan data lapangan penulis menyimpulkan bahwa Camat melakukan koordinasi vertikal dengan Pemerintah Kota atau dengan Wali Kota

selaku atasan Camat, Lurah, masyarakat dan dinas-dinas yang dianggap berkaitan dengan pembangunan fisik. Koordinasi dengan dinas-dinas terkait termasuk kedalam koordinasi diagonal yang dilakukan oleh camat. Koordinasi vertikal merupakan tindakan-tindakan mewujudkan menciptakan disiplin antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit yang samatugasnya. Selain itu koordinasi antar badan (instansi), unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain saling bergantung atau mempunyai kaitan baik yang levelnya setaraf.

### **b. *Koordinasi Horizontal***

Koordinasi horizontal yaitu koordinasi struktur dimana antara yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis ini juga dapat dikatakan sebagai koordinasi yang bersifat hierarkis karena satu dengan yang lainnya berada pada satu garis komando. Camat sebagai pemimpin di Kecamatan senantiasa berkoordinasi dengan bawahan atau Staff yang berkaitan dengan tugas masing-masing sub bagian maupun berkaitan dengan masalah pembangunan yaitu berkoordinasi dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan fisik di Kecamatan Sungai Kunjang.

Camat dalam koordinasi horizontal yaitu kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya sudah dilakukan secara baik dan tidak segan-segan Camat turun langsung ke lapangan untuk memberikan arahan sehingga hubungan yang harmonis dapat tercipta.

### ***Kegiatan Pengawasan Perencanaan Pembangunan Fisik***

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis menyimpulkan bahwa peran Camat dalam pengawasan pembangunan di Kecamatan Sungai Kunjang sudah dilaksanakan dengan baik baik secara langsung dilapangan dan tidak langsung. Pelaksanaan Pengawasan oleh Camat bukan bermaksud untuk mencari kesalahan yang dilakukan, melainkan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan pekerjaan, apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Instruksi dari Camat berisi satu atau beberapa pekerjaan yang harus dilaksanakan Kepala Seksi masing-masing untuk dilaksanakan oleh semua pegawai dibidangnya Kantor Kecamatan Sungai Kunjang.

Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga hubungan dengan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dengan menciptakan pengawasan yang efektif baik pengawasan langsung maupun tidak langsung untuk mendorong adanya pengawasan dari masyarakat sehingga tercipta hubungan yang harmonis dari semua pihak yang terlibat. Kegiatan pengawasan

pembangunan yang diarahkan untuk terus menyempurnakan sistem pengawasan pembangunan, dan meningkatkan kegiatan dan kualitas pengawasan agar proses pembangunan dapat berjalan secara lebih efisien, efektif, dan mencapai hasil-hasil yang optimal.

### ***Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditentukan yaitu bagaimana Peran Camat dalam Pembangunan Fisik di Kecamatan Sungai Kunjang, maka disimpulkan beberapa hal, adalah sebagai berikut:

1. Peran Camat dalam penyerapan partisipasi masyarakat pada kegiatan perencanaan pembangunan fisik di Kecamatan Sungai Kunjang sudah terlaksana dengan baik, dimana masyarakat selalu dilibatkan dalam pembangunan fisik mulai dari pengusulan di pramusrembang Kelurahan sampai dengan musrembang tingkat Kecamatan, adanya swadaya masyarakat dalam gotong-royong serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan pada setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan di Kecamatan maupun di Kelurahan.
2. peran camat dalam kegiatan penyusunan perencanaan pembangunan (musrenbang) di tingkat Kecamatan sudah dilakukan dengan aktif dan baik. Baik ditingkat kelurahan sampai pada tingkat Kecamatan selalu melibatkan sebagai Muspika Kecamatan, LPM Kelurahan, Lurah, ORMAS, FKPM, FORKOHAT, yang terkait dengan tokoh-tokoh masyarakat, Camat sebagai Muspika Kecamatan ditambah lagi, PKK tingkat kelurahan dan kecamatan dan anggota dewan daerah pilih Sungai Kunjang. Merencanakan yang berarti melihat jauh ke depan dan menentukan terlebih dahulu yang akan dikerjakan, merancang bagaimana jalannya pekerjaan dan mempersilahkan hal-hal yang perlu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan sesuai aspirasi masyarakat.
3. Dalam pelaksanaannya, koordinasi perencanaan pembangunan fisik hendaknya diterapkan dalam keseluruhan proses pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan sampai dengan evaluasinya. Pelaksanaan kegiatan di pemerintah Kecamatan yang dilakukan Camat terdiri dari koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Camat dalam koordinasi vertikal yaitu kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya sudah dilakukan secara baik dan tidak segan-segan Camat turun langsung ke lapangan untuk memberikan arahan sehingga hubungan yang harmonis dapat tercipta. Dalam berkoordinasi horizontal Camat sudah melakukan koordinasi teknis dan operasional seperti Lurah, Dinas PU dan Bina marga dan pengairan. Selain itu koordinasi teknis fungsional seperti,

LSM, Parpol, Ormas. Camat dalam berkoordinasi membahas pembangunan fisik sudah dilakukan dengan baik dan menjalin hubungan komunikasi yang harmonis melalui media musyawarah rencana pembangunan Kecamatan.

4. Kegiatan pengawasan perencanaan pembangunan fisik dalam pembangunan di Pemerintah Kecamatan terdiri dari pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Camat dalam melakukan pengawasan sudah berjalan dengan baik, Camat melakukan pengawasan langsung dilapangan dan melalui laporan-laporan dari bawahan maupun masyarakat dan pihak-pihak yang peduli akan adanya kegiatan pembangunan. Dimana Camat melakukan kerjasama antara bawahan sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan bersama-sama. Peran Camat dalam pengawasan tidak langsung sudah dilakukan dengan baik, dimana Camat memberikan arahan kepada staf maupun unit kerja dari Kecamatan untuk memberikan laporan dilapangan sebagaimana yang terjadi di lapangan untuk kelancaran dan kelengkapan laporan dan pertanggung jawaban Camat kepada Pemerintah Kota. Hasil pengawasan melalui laporan harus dapat menunjukkan sampai dimana menunjukkan kecocokan dan ketidakcocokan yang muncul.

### ***Saran***

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan langsung oleh penulis terdapat beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Kecamatan dalam menentukan prioritas program pembangunan di Kelurahan harus lebih sesuai dengan permasalahan yang ada dilapangan.
2. Efektifitas pengawasan Camat yang berada di Kecamatan Sungai Kunjang yang sudah baik harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi supaya menjadi lebih baik melalui menyelenggarakan program-program pembangunan baik dari program Kelurahan, Kecamatan maupun program pembangunan kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan perlu adanya lagi peningkatan khususnya juga buat staf pegawai Kecamatan Sungai Kunjang sehingga bisa dapat bekerja sama dengan baik, baik dengan Camat maupun dengan para staf lainnya, sehingga bisa menghasilkan sumber daya yang berkualitas, dan bisa bekerja lebih baik lagi.
3. Koordinasi yang dilakukan Camat sudah berjalan baik harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Pembangunan sarana fisik harus lebih diperhatikan dalam hal-halnya seperti pendanaan, lokasi, dan waktu pelaksanaan sehingga tidak ada lagi keluhan dari masyarakat mengenai pembangunan maupun perbaikan jalan, namun perlu juga adanya kerja

sama yang begitu erat sehingga tidak adanya keterlambatan dalam koordinasi dan komunikasi dari pemerintah kota Dinas Pekerjaan Umum kepada Kecamatan dan Kelurahan yang selalu bekerjasama dalam program pembangunan di Kecamatan, sehingga apa yang diharapkan dalam pelaksanaan program pembangunan di Kecamatan akan berdaya guna dan berhasil guna semua bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Adam.2000. *Sosiologi Keluarga*. Gramedia. Solo.
- Afifuddin. 2012. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Alfabeta. Bandung .
- Arikunto S. 2012. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. (Edisi Revisi). Rineka Cipta . Jakarta.
- Bayu Suryaningrat. 1981. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Bina Aksara. Jakarta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah (strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Conyers Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar Edisi 2* (Penerjemah : Susetiawan). Gajah Mada University press. Yogyakarta.
- Effendi Bachtiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*. Kurnia Kalam Semesta. Yogyakarta.
- Kaloh J. 2009. *Kepemimpinan Antara Kegagalan dan Keberhasilan*. Kata Hasta Pustaka. Jakarta.
- Karl, Fremont E. Dan Rosenzweig, James E, 2002. *Organisasi dan Manajemen (edisi 4)*. Bumi Akasara. Jakarta.
- Kartini Kartono. 2010. *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*. Rajawali Press. Jakarta.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. PT.Raja Grafindo Persada. Semarang.
- Malayu Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, cetakan kesembilan, PT Bumi Aksara. Jakarta .
- Maleong J Lexy. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakaya. Bandung.
- Pamudji, 1995. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Riyadi Dkk. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rustiadi Ernan, 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.

- Sudriamunawar Haryono. 2002. *Pengantar Administrasi pembangunan*. Mandar Maju. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Sumodiningrat Gunawan. 1998. *Pemberdayaan Masyarakat dari JPS*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Sondang P siagian. 2003. *Administrasi pembangunan*. PT. Bumi aksara. Jakarta.
- Suryono Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Malang Press. Malang.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumaryadi Nyoman. 2005. *Perencanaan pembangunan daerah otonom dan pemberdayaan masyarakat*. Citra utama. Jakarta.
- Suwatno. 2001. *Asas-asas Manajemen*. ANDI. Yogyakarta.
- Syaf' fie Inu Kencana. 2003. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah Kurniawan. (2005). *Pengantar Manajemen*. Kencana. Jakarta.
- Tjiptoherijanto Prijono dan Abidin Zainal Said. 1993. *Reformasi Administrasi dan Pembangunan Nasional*. Fakuktas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.
- Ulbert Silalahi. 2002. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Sinar Baru Algesindo. Bandung.
- Veitzhal Rivai. 2004. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. PT.Raja Grafindo. Jakarta.
- Wresniwiro, 2007. *Membangun Republik Desa*. Visimedia. Jakarta.

**Dokumen:**

\_\_\_\_\_. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

\_\_\_\_\_. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  
Pembangunan Nasional